

STRATEGI UNTUK PENGUATAN SINERGI SIPIL MILITER DALAM PENGAMANAN WILAYAH UDARA INDONESIA TIMUR

H.Priyono D.P.¹, Much. F. Muchaddats², Kurniawan P.Y.³, T. Dikatama T.⁴

^{1,2,3,4}National Air And Space Power Of Indonesia

^{1,2,3}Muchammadfurqon10@gmail.com;

⁴ikeo.santai@gmail.com.

Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena “belum optimalnya sinergi sipil militer dalam melaksanakan pengamanan wilayah udara Indonesia Timur” yang dilatarbelakangi oleh terbatasnya kualifikasi personel melaksanakan fungsi Identifikasi dan Pengaturan Lalu Lintas Udara (PPLU), birokrasi pelaporan *Security Clearance* dan *Flight Clearance* pesawat asing yang lambat, birokrasi upaya penindakan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing memerlukan rentang waktu dan mekanisme yang panjang, dan belum ada kerjasama pemanfaatan radar sipil untuk kepentingan militer dalam pengamatan ruang udara di wilayah timur Indonesia. Adapun teori yang relevan dengan fokus penelitian adalah teori tentang keamanan wilayah udara, operasi pertahanan udara, *Civil Military Relations*, sinergi, dan strategi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan panduan pertanyaan dan desain penelitian studi kasus wilayah udara Indonesia timur. Narasumber berasal dari institusi yang relevan dan memiliki kapabilitas untuk memberikan jawaban tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa bersinergi atau berkolaborasi dalam konteks membangun *Civil Military Relation* yang telah dilaksanakan antara Kosek III Biak dengan AirNav lebih dari sekedar bekerjasama. *Civil Military Relation* menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai suatu ‘*creative cooperation*’.

Kata Kunci: *Civil Military Relations*, Keamanan Wilayah Udara, Sinergi, Strategi

Abstract — This research aims to provide an overview of the phenomenon of "not yet optimal military-civil synergy in carrying out security of Eastern Indonesia's airspace" which is motivated by the limited qualifications of personnel carrying out the Air Traffic Identification and Regulation (PPLU) function, the bureaucracy of reporting Security Clearance and Flight Clearance of foreign aircraft. slow, bureaucratic efforts to take action against airspace violations by foreign aircraft require a long period of time and mechanisms, and there is no cooperation in using civil radar for military purposes in observing air space in eastern Indonesia. The theories relevant to the research focus are theories about airspace security, air defense operations, *Civil Military Relations*, synergy, and strategy. The research method used was descriptive qualitative using guided questions and a case study research design in eastern Indonesia's airspace. Resource persons come from relevant institutions and have the capability to provide answers to the problems studied. The research results found that synergizing or collaborating in the context of building *Civil Military Relations* which had been implemented between Kosek III Biak and AirNav was more than just working together. *Civil Military Relations* creates better and more innovative solutions or ideas from cooperation, therefore it can be stated as '*creative cooperation*'.

Keywords: *Civil Military Relations*, Airspace Security, Synergy, Strategy

a questionnaire as a data collection technique. This study uses the SPSS analysis tool to determine the relationship between the two research variables. Regression analysis was used in this study to determine the causal relationship between variables. The hypothesis in this study is that the competence of Kosekhanudnas III personnel will affect the performance of Kosekhanudnas III personnel and the training of Kosekhanudnas III personnel will affect the performance of Kosekhanudnas III personnel. The results of this study indicate that the competence of Kosekhanudnas III personnel has an effect on the performance of Kosekhanudnas III. This is indicated by the probability value for the personnel competence variable is 0.000. The probability value is smaller than the research significance level of 0.05. In addition, the personnel training of Kosekhanudnas III has an effect on the performance of Kosekhanudnas III. This is indicated by the probability value for the personnel training variable is 0.015. The probability value is smaller than the research significance level of 0.05.

Keywords: Competence, training, performance, Kosekhanudnas III personnel.

1. PENDAHULUAN

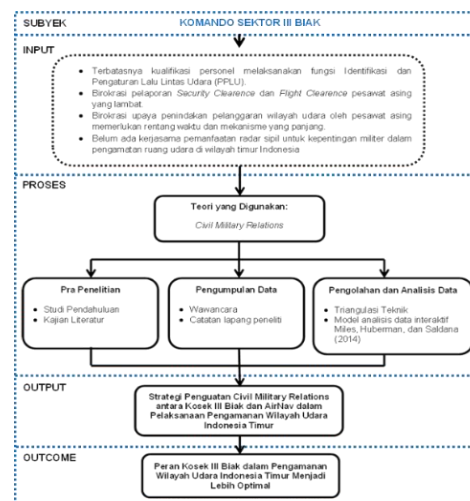
Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah geografis yang sebagian besar berupa kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta berada di antara Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Letak strategis tersebut menjadi kan kondisi politik, perekonomian, serta keamanan yang ada padaa tingkat lokal dan dunia menjadi salah satu kunci utama betapa berpengaruhnya negara Indonesia pada dunia (Lasabuda, 2013). Letaknya yang strategis sangat memberi kan pengaruh bagi perkembangan dunia baik secara regional maupun global. Mencermati kondisi tersebut, perkembangan akan lingkungan strategis maupun global semakin lama akan semakin kuat pengaruh nya bagi keadaan nasional, tentunya karena adanya kemungkinan terjadinya serangan dari negara lain, oleh karena itu setiap kemungkinan ancaman keamanan bagi negara Indonesia yang mengancam keutuhan bangsa harus segera dicegah (Sulistyo, 2020). Menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Tentara Nasional Indonesia mendapatkan mandat untuk menjadi alat utama pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki tugas untuk menegakan kedaulatan sebuah negara serta menjaga keutuhan negara Indonesia

selain tercantum dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, tugas TNI tersebut juga tertulis dalam UU Nomor. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) merupakan Komando Utama Operasi TNI yang bertugas untuk mengadakan berbagai cara untuk mempertahankan dan mengamankan negara NKRI di wilayah udara nasional. Upaya tersebut dilakukan secara mandiri atau dilakukan bersama Komando Utama Operasional lain. Pertama untuk menciptakan kedaulatan serta keutuhan Negara Indonesia. Kedua, Untuk melakukan penguatan bidang administrasi serta kesiagaan semua unsur operasi pertahanan TNI Angkatan Udara. Ketiga, menjalankan penguatan operasi serta menjalankan operasi semua unsur pertahanan udara pada lingkungannya untuk membantu tugas dari TNI Angkatan Udara. Mencermati kondisi geografis wilayah udara nasional yang luas maka Kohanudnas dibagi menjadi empat sektor yaitu sektor I, II, III dan IV. Keempat sektor diatas, Kosekhanudnas III merupakan salah satu dari Komando yang melaksakan tugas Kohanudnas. Kosekhanudnas III mengemban tugas untuk melaksanakan serta mengendalikan operasi pertahanan pada wilayah udara negara Indonesia yang dilakukan pada wilayah geografis yang menjadi

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk saling mendistribusikan informasi penerbangan, mem-bentuk PPLU yang memiliki kemampuan MCC yang professional. Namun demikian sampai saat ini belum ada kajian yang komprehensif mengenai efektivitas sinergi sipil militer yang terjalin dalam melaksanakan pengamanan wilayah udara nasional. Operasi pertahanan udara (Opshanud) pada dasarnya ditujukan untuk menguasai dan mengendalikan wilayah udara nasional secara terus menerus baik pada masa damai maupun masa perang. Kesiagaan Hanud pada masa damai harus memungkinkan dilaksanakannya pertahanan awal terhadap setiap serangan udara sehingga memberikan peluang bagi penggelaran perkuatan Hanud (Naskah Sekolah tentang Operasi Pertahanan Udara). Hubungan sipil-militer atau *civil-military relations* adalah peran militer di dalam masyarakat yang biasanya di diskusikan dengan istilah 'kontrol sipil'. Kontrol sipil terbagi menjadi dua jenis yakni *subjective civilian control* dan *objective civilian control* (Huntington, 2000). Terdapat tiga bentuk *subjective civilian control* yakni *civilian control by government institution*, *civilian control by social class*, dan *civilian control by constitutional form*. Definisi yang paling sederhana dari sinergi adalah hasil upaya kerjasama atau '*co-operative effort*', karena itu inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama (Purnama, 2019). Dalam konteks untuk mencapai sinergi yang optimal, maka diperlukan juga adanya suatu kolaborasi antar *stakeholder* yang optimal, yang bisa dicapai dengan melaksanakan *collaborative governance*. Istilah *collaborative governance* merupakan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung semua pemangku kepentingan termasuk yang di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008). Sampai seberapa

jauh suatu organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk bisa memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagunakan keunggulan organisasi yang dimiliki pada saat ini (Rahim & Radjab, 2017).

Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang secara umum dipakai untuk meng eksplorasi dan juga memahami makna masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman hidup individu, (Mary Anbarasi Johnson; "The Need for Qualitative Research in Pediatric Nursing," 2024) memungkinkan peneliti untuk menangkap data kontekstual yang kaya tentang perilaku, keyakinan, dan emosi (Johnson, 2024) (Pope et al., 2023). Metode seperti wawancara, kelompok fokus, dan studi etnografi memfasilitasi eksplorasi mendalam perspektif peserta. (Yeonsoo Sara Lee; *Qualitative Methods and Mixed-Methods*, 2023) (Mary Anbarasi Johnson; "The Need for Qualitative Research in Pediatric Nursing," 2024) Desain penelitian adalah rincian prosedur atau kerangka kerja yang berisi tentang apa saja yang akan

dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proses, luaran yang akan dihasilkan, dan perkiraan apakah penelitian telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau tidak (Fadli, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kosek III Biak sebagai instansi yang secara langsung terlibat dengan kegiatan paman tauan lalu lintas udara, pelaporan dan penindakan, serta dengan penam bahan data pendukung dari instansi lain yang terkait antara lain PT. AngkasaPura sebagai pengelola ATC. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan mem pertimbangkan keterlibatan dan rele vansi dari kedua institusi tersebut dengan topik yang diteliti. Permasalahan di atas kemudian dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu mengenai sinergi sipil militer yang telah terjalin di wilayah kerja Kosek III Biak, dan peran Kosek III Biak untuk dapat mewujudkan sinergi sipilmiliter yang lebih optimal dalam melaksanakan pengamanan wilayah udara Indonesia Timur. Menurut definisinya, dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Sugiyono, 2017). Data primer diperoleh dari wawancara kepada narasumber penelitian, kuesioner, dan hasil catatan kegiatan dari hasil diskusi. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil *in-depth interview* dan pengamatan dianalisis melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017). Saat mela kukanalisis deskriptif kualitatif, peneliti mengacu pada Model Interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Konsep *Civil Military Relation* antara Wilayah Timur dan LPPNPI/AirNav dalam Melaksanakan Pengamanan Wilayah Udara

Pengamanan Wilayah Udara Indonesia Timur sebagai bagian dari kedaulatan

wilayah udara nasional merupakan suatu urgensi dan juga membutuhkan strategi yang konkret termasuk dalam aspek manajemen kritis jika terjadi kendala atau ancaman. Kerjasama pengamanan wilayah udara di wilayah timur Indonesia (Papua) perlu dipikirkan secara cermat dan tidak hanya diterapkan secara parsial atau di masing-masing bandara namun perlu mencakup organisasi yang meliputi seluruh wilayah Papua sehingga dapat diterapkan satu komando yang efektif, efisien, dan cepat. Dalam era *civil society*, masa kini dan mendatang, kerja sama sipil dan militer (*Civil Military Relation*) menem pati ruang yang luas. Kosek III Biak serta LPPNPI/AirNav sudah mulai mem bangun peta jalan kerja sama *mutualistic* dalam melaksanakan pengamanan wilayah udara nasional. Kosek III dapat melaksanakan tugas pengamanan wilayah udara dengan baik dengan dukungan data dan informasi penerbangan dari AirNav. Prosedur pertukaran data dan informasi berupa *data surveillance* dan *flight plan* yang tampil pada Pusat Operasi Sektor (Posek) Kosek III dikirim dari MATSC (*Makasar Air Traffic Service Centre*) melalui sarana jalur *fiber optic* milik Telkom. Data operasi penerbangan dari MATSC dapat diterima secara *real time* di Posek Kosek III sehingga sangat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Hanud secara optimal. Prosedur pertukaran data dan informasi berupa *data surveillance* dan *flight plan* yang dilakukan antara Kosek III dan LPPNPI/AirNav sebagai pihak yang telah ditunjuk untuk meng-*handle* LOCA/ *Letter of Operation Coordination Agreement* mengenai kerja sama pengamanan wilayah udara dilak sanakan secara ber sama antara kedua belah pihak. Seluruh elemen bangsa tidak hanya TNI memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan NKRI termasuk kedaulatan wilayah udara nasionalnya. Sinergitas antara elemen bangsa dalam dengan LPPNPI/ AirNav dibutuhkan dalam membangun stabilitas dan pertahanan bangsa atau negara. Konsepsi yang diterapkan oleh Kosek III Biak untuk

membangun *Civil Military Relation* dengan LPPNPI/AirNav tersebut menyadarkan kita akan arti penting hubungan sipil dan militer, untuk dapat bisa memahami dan mengerti urgensi hubungan kerjasama dalam kerangka *Civil Military Relation*.

3.2. Strategi untuk Penguatan *Civil Military Relation* antara Wilayah Timur dengan LPPNPI/AirNav dalam Melaksanakan Pengamanan Wilayah Udara

Istilah *Civil Military Relation* dalam konteks pengamanan wilayah udara Indonesia Timur merupakan cara pengelolaan hubungan kerjasama antara sipil (AirNav) dan militer yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan pada kedua belah pihak, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program bersama terutama yang terkait pelaksanaan pengamanan wilayah udara nasional. Esensi dari manajemen krisis dalam membangun *Civil Military Relation* adalah kepemimpinan dan manajemen yang dikembangkan secara terintegrasi dan terkendali. Kosek yang bertanggung jawab terhadap "*Control of the Air*" berperan sebagai penyelenggara perlindungan udara sehingga memberi keleluasaan bergerak seluruh satuan di mandala operasi. *Civil Military Relation* antara Kosek III Biak dan AirNav merupakan suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Model *Civil Military Relation* mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan keperluannya, penting mengetahui pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajerial yang diperlukan untuk penguatan *Civil Military Relation*, yaitu:

- **Planning**/perencanaan, menentukan tujuan dan sasaran utama Kosek III

Biak agar berhasil, termasuk di antaranya mengembangkan strategi, menetapkan kebijakan internal, merencanakan anggaran, dan petunjuk-petunjuk umum untuk menggiatkan jalannya operasi;

- **Organizing**/organisasi, menentukan secara spesifik aktivitas maupun kebutuhan untuk mencapai sasaran maupun hasil yang akan dicapai Kosek III Biak;
- **Directing**/pengarahan, mengarahkan perilaku anggota Kosek III Biak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Kosek III Biak dan sesuai kebutuhan, rencana maupun desain;
- **Controlling**/pengawasan, kegiatan yang dilakukan oleh komandan kesatuan untuk mengetahui apakah aktivitas organisasi Kosek III Biak di jalankan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh anggota Kosek III Biak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Upaya untuk membangun format baru hubungan sipil-militer dalam konteks pelaksanaan pengamanan wilayah udara nasional memerlukan landasan yang lebih fundamental. Kemampuan berkomunikasi para anggota Kosek III Biak adalah proses pemahaman terhadap sudut pandang pengalaman (*field of experience*) maupun kerangka berpikir (*frame of reference*) masing-masing anggota. Kualitas *Civil Military Relation* yang dikembangkan terbentuk dari perilaku kerjasama anggotanya, perilaku belajar inovatif, dan intensitas kerja. Dalam dimensi hubungan, kematangan itu ditunjukkan dari hubungan kerjasama saling menguntungkan (*mutuality*) dan saling ketergantungan (*interdependence*) dalam penyelesaian tugas mereka. Dengan demikian kualitas *Civil Military Relation* akan terwujud, bila kelompok sudah mencapai tingkat kebersamaan dan saling ketergantungan. Sementara itu, setiap bentuk kolaborasi termasuk sinergi antara sipil dan militer dalam melaksanakan pengamanan wilayah udara nasional antara Wilayah Timur dan AirNav harus memiliki minimal

lima komponen yang meliputi *personal commitment* (komitmen personal), *communication skills* (kemampuan berkomunikasi), *interaction processes* (proses interaksi), *program or services* (program/pelayanan), dan *context*. Kelima komponen di atas dapat diuraikan keterkaitannya sebagai berikut:

- **Pertama**, titik tekan penyelenggaraan sinergi antara sipil dan militer terletak pada komponen komitmen yang telah disepakati oleh para kolaborator.
- **Kedua**, kemampuan berkomunikasi masing-masing individu, terutama yang terkait dengan konteks kerja sama antar anggota, para kolega dan para profesional ataupun dengan anggota komunitas lainnya yang relevan dengan cara memahami berbagai budaya yang berbeda serta latar belakang bahasa yang berbeda pula.
- **Ketiga**, proses interaksi masing-masing individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan konseptualisasi tentang sebuah aktivitas yang terkait dengan pemecahan masalah, kemauan untuk berkonsultasi serta memiliki kemampuan/keahlian berkomunikasi dalam melakukan negosiasi terkait dengan hal-hal yang mendasar.
- **Keempat**, dalam sebuah kolaborasi harus dicantumkan komponen tentang penyusunan program, pemberian layanan yang berkaitan dengan konteks kolaborasi serta terfokus pada program-program kegiatan yang di butuhkan dan harus dengan jenis/bidang yang di kolaborasikan.
- **Kelima**, komponen konteks sebagai komponen yang terakhir merujuk pada kebutuhan tentang lingkungan, yakni lingkungan ideal yang seperti apakah yang dibutuhkan oleh kolaborasi itu dalam menjalankan aktivitasnya.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Bersinergi/berkolaborasi dalam konteks membangun *Civil Military Relation* yang

telah dilaksanakan antara wilayah udara timur dengan *AirNav* lebih dari sekedar bekerjasama. *Civil Military Relation* menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai suatu *creative cooperation*. Hubungan kerjasama tidak semata-mata untuk membangun keber samaan, tetapi juga membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing pihak membentuk kreativitas secara kolektif. Pengembangan pengetahuan, wawasan sebagai perwujudan dari sinergi itulah yang dirasakan penting sekali untuk dipertahankan.

- *Civil Military Relation* antara wilayah udara timur dengan *AirNav* menghendaki terwujudnya keadilan dalam memenuhi kepentingan publik. *Civil Military Relation* adalah konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan juga pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Dengan demikian maka upaya membangun *Civil Military Relation* dapat dikatakan sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan "*public value*" berupa pengamanan wilayah udara nasional yang lebih optimal. Sehingga strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan membangun *Collaborative Governance* pengamanan wilayah udara nasional sebagai implementasi *Civil Military Relation*.

5. REFERENSI

- [1] Creswell, J.W. (2016). *research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Dwingraha, A. P. (2017). Sinergitas aktor kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi pada desa Urek-Urek Kec. Gondang legi

- Kab.Malang). *Publisia* (Jurnal Ilmu Administrasi Publik),1-7.
- [3]Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian ilmiah mata kuliah umum*, 33-54.
- [4]Herzegovina,S., Gunawan, D., & Lestari, A. A. (2021). Analisis lokasi penempatan radar GCI dan gap filler dalam mendukung pertahanan negara berbasis sistem informasi geografis di wilayah Kosekhanudnas I. *Jurnal Teknologi Penginderaan*, 42-52.
- [5]Huntington, S. P. (2000). *the soldier and the state (15th Ed)*. Cambridge: *The belknap press of harvard uni versity press*.
- [6]Komando Pertahanan Udara Nasional. (2017). *Prosedur tetap operasi pertahanan udara*.
- [7]Mildiawan, H., Y.S, V. P., & Budiarto, M. (2022). Analisa cycle time pada industri persenjataan nasional untuk mempercepat hasil produksi senjata dan memperkuat pertahanan nasio nal. *Journal of Industrial Engi neering & ManagementResearch*,1-8.
- [8]Miles, M. B.,Huberman,A.M., & Saldana, J. (2014). *qualitative data analysis, a methods sourcebook, 3rd edition*. USA: Sage Publications.
- [9]Moleong,L.J(2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- [10]Purnama,T.T.(2019). Implementasi sinergitas dan kemitraan insan litbang akmil dalam mewujudkan *the world class military academy*. Yogyakarta: Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha.
- [11]Rahim, A. R., & Radjab, E. (2017). *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga perpustakaan dan penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [12]Savitri, R. N., & Prabandari, A. P. (2020). TNI AU dan keamanan wilayah udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 236-245.
- [13]Setiani, B. (2017). Konsep kedaulatan negara di ruang udara dan upaya penegakan pelanggaran kedaulatan oleh pesawat udara asing. *Jurnal konstitusi*, 489-510.
- [14]Subagyo, A., & Ginanjar, Y. (2020). Sinergi kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan dalam politik luar negeri Indonesia. *Indonesian Perspective*, 72-91.